

Upaya Mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Oleh:

¹ Gozi Apniwansyah; ² I Putu Widiantera; ³ Mega Trishuta Pathiassana

^{1,2}. Program Studi Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa

³. Program Studi Konservasi Sumber Daya Alam, Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Universitas Teknologi Sumbawa

Email.

goziapniwansyah84@gmail.com

Abstrak

Perencanaan pembangunan daerah harus didukung oleh sistem informasi yang baik dan saat ini telah dicanangkan penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang menggantikan sistem informasi lama. Namun, belum diketahui apakah SIPD ini akan dapat berperan dengan baik dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tentang upaya mengoptimalkan SIPD di Kabupaten Sumbawa dengan membahas proses persiapan implementasinya dan bentuk penyesuaiannya di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Peran SIPD ke perencanaan pembangunan daerah juga dibahas. Metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi dokumen terkait, observasi ke kantor perangkat daerah, dan wawancara ke informan-informan yang terkait dengan SIPD Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil penelitian, telah terjadi upaya pengoptimalan SIPD yang mana ditunjukkan dengan adanya kegiatan sosialisasi yang terencana dan berkelanjutan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang mana dilakukan sebelum dan sesudah diimplementasikannya SIPD. Berdasarkan sosialisasi tersebut telah dilakukan penyesuaian berdasarkan keadaan yang terjadi yang mana dilakukan dengan membuat kebijakan tentang honor dan menyediakan aplikasi *smartphone* SIPD di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Kemudian, SIPD dirasa mampu mendukung perencanaan daerah yang mana dapat dilihat dari pengaruh positifnya terhadap faktor-faktor pendukung perencanaan pembangunan daerah. Maka, upaya untuk mengoptimalkan SIPD di Kabupaten Sumbawa telah dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan di daerah tersebut.

Kata Kunci: Sistem informasi; persiapan SIPD; penyesuaian SIPD; perencanaan pembangunan daerah

Abstract

Development planning must be supported by decent information system and recently it was suggested to apply Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) replacing the old one. However, it is unknown whether SIPD will perform well. This research aim to study the effort to optimize SIPD in Sumbawa District which showed from the implementation preparation and adjustment of SIPD in the level of village, subdistrict, and district. Role of SIPD to regional development planning itself is also assessed. The research method used here is documentation of related document, observation to the regional bureau, and interview to a number of informants that are related to SIPD. From this research, an effort to optimize the implementation of SIPD have been done which shown from a number of planned and sustained socializations in the level of village, subdistric, and district. Based on this SIPD have been adjusted by giving honor and smartphone application in the level of village, subdistrict, and district. SIPD was found supporting the regional development planning because of its positive influence on the factors that support the regional development planning. Thus, effort to optimize SIPD in Sumbawa District was done by considering the situation in that district.

Keywords: Information system; preparation of SIPD; adjustment of SIPD; regional development planning

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan amanat dari undang-undang yang membahas pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah perencanaan yang melalui proses koordinasi, senergisasi, dan harmonisasi oleh aktor pemerintahan daerah yang bertanggung jawab merencanakan pembangunan di daerahnya. Perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai tahap awal melakukan proses pembangunan (Rondinelli 2019). Unsur perencanaan adalah termasuk di dalamnya memilih/membuat pilihan, pengalokasian sumber daya, pencapaian tujuan, pelaksanaan kegiatan yang bersifat *continuous* atau terus menerus. Untuk pembangunan dikemukakan sebagai suatu upaya untuk menumbuhkan dan mengubah sesuatu yang sebelumnya sudah ada proses perencanaan dan dilakukan secara sadar baik oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk dapat tercapainya modernisasi yang bertujuan untuk membina bangsa. Perencanaan dalam pembangunan akan bersesuaian dan sejalan manakala didukung oleh ketersediaan data serta informasi yang valid yang dapat dijadikan sebagai rancangan/desain dalam proses kegiatan perencanaan dan percepatan pembangunan (Agranoff and Mc Guire 2006; Sudianing, Ni Ketut; Seputra 2019). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menggunakan Sistem Informasi yang berbasis lokal yang mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis elektronik. Hal ini telah menjadi sesuatu yang umum dan banyak penelitian yang membahas tentang hal ini di berbagai organisasi (Anggoro and Hidayat 2020; Muntohar 2020).

Sistem informasi yang diimplementasikan di dalam suatu organisasi tertentu merupakan komponen yang sangat penting dan bertumbuh cepat seiring dengan berjalannya waktu (Checkland and Holwell 1998; O'Brien and Marakas 2008). Sistem informasi mampu memberikan data penting yang nantinya dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan secara tepat dan akurat. Jika sistem informasi ini dilakukan secara *online* maka penggunaannya dapat memudahkan aktor pengguna untuk mengakses data tersebut kapan saja dan di mana saja. Sampai dengan tahun 2018, pemerintahan Kabupaten Sumbawa menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah atau dikenal dengan SIMREND (Bappeda Kab. Sumbawa 2021). SIMREND ini aplikasinya tidak berjalan dengan baik sepenuhnya. Selain itu juga efektivitasnya dirasa masih sangat rendah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal di antaranya ketidakmampuan aktor di pemerintahan daerah tersebut mengidentifikasi sejumlah kendala yang khusus ada di daerah tersebut. Kendala-kendala yang spesifik lokasi dan waktu ini menyebabkan penerapan sistem SIMREND untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah menjadi terhambat (Setianingsih, Setyowaty, and Siswidiyanyo 2019). Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan yang mengharuskan Pemerintah

[illegible]

SIPD yang dijelaskan dalam Permendagri No. 8 Tahun 2014 merupakan bentuk sistem yang berfungsi untuk melakukan dokumentasi, melakukan administrasi, dan juga melakukan pengolahan data pembangunan daerah untuk nantinya dijadikan informasi yang diperlihatkan kepada masyarakat. Selain itu juga, data tersebut dipergunakan untuk mengambil keputusan untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja dari pemerintah daerah. SIPD ini juga memiliki fungsi untuk melakukan monitoring perkembangan dari pemerintahan daerah. Sistem informasi ini juga dipakai untuk melengkapi informasi dan data yang digunakan untuk pembangunan di daerah. Fungsi SIPD juga sebagai media untuk mengakomodir data dengan cepat dan akurat dengan berbasis teknologi informasi, dalam bentuk dukungan terhadap perencanaan program & kegiatan yang juga mencakup evaluasi terhadap pembangunan daerah dengan efektif, rasional, serta efisien. Sistem ini juga dapat mendukung integrasi penyampaian data yang berhubungan dengan perkembangan pembangunan di instansi pemerintah masing-masing. Dalam upaya optimalisasi sistem informasi terdapat sejumlah hal yang krusial untuk dieksekusi yang mana diantaranya harus ada efektifitas serta efisiensi untuk menghubungkan atau mengintegrasikan sistem-sistem yang ada untuk mendukung perencanaan pembangunan. Selain itu sesuatu yang tidak kalah krusialnya adalah harus ada penguatan kapasitas sumber daya aktor pemerintahan yang terlibat dalam penggunaan SIPD ini. Salah satu contoh upaya adalah untuk daerah dengan potensi wisata dapat didukung dengan penguatan informasi tentang seberapa jauh potensi-potensi yang terkandung di daerah tersebut.

Dalam penelitian terdahulu oleh Sudianing dkk dijabarkan bagaimana peran SIPD dalam perencanaan pembangunan daerah secara umum (Frans Dione 2020; Sudianing, Ni Ketut; Seputra 2019). Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa salah satu faktor sistem informasi yaitu tata kelola haruslah berkualitas dalam menunjang perencanaan pembangunan di daerah. Kemudian juga, pada penelitian ini juga dijelaskan bahwa SIPD harus mampu menghasilkan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan mampu mendorong transparansi publik di daerah. Pada penelitian ini secara jelas dijabarkan bagaimana peran dari SIPD mampu menghasilkan adanya peningkatan performa perencanaan pembangunan di daerah. Nasution dkk meneliti bagaimana peran SIPD terhadap badan pemerintahan untuk studi kasus di Kota Medan (Nasution and Nurwani 2021). Dalam penelitian ini dibahas bagaimana keadaan dari daerah yang menjadi studi kasus. Pada kasus Medan, kegiatan SIPD ini dikaitkan dengan keharmonisan keberjalanannya. Kemudian juga, dibahas tentang disposisi dan pelaksana/aktornya yang mana permasalahan yang dibahas adalah tentang bagaimana pengambil keputusan mengalami kesulitan untuk mengakomodir keinginan, kebutuhan, dan masalah apa yang harus segera ditangani. Penelitian oleh Karundeng dkk implementasi SIPD ini telah mengalami penyesuaian yang baik dimana terlihat pada perencanaan dan penganggaran daerah oleh bappelitbangda sudah mengalami integrasi yang baik dengan SIPD. Di sini juga dibahas bagaimana keadaan suatu daerah tertentu mampu mempengaruhi bagaimana kinerja dari SIPD seperti kualitas jaringan. Berdasarkan penelitian diatas, bahwa SIPD sangat bersesuaian dengan kebutuhan daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang memerlukan sistem informasi yang berbasis web dengan jaringan dan jangkauan yang luas, sehingga konektivitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat terjalin dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, adalah penting untuk mengkaji apakah sistem informasi SIPD ini akan secara optimal berjalan di daerah tertentu oleh karena nantinya akan mempengaruhi keberhasilan dari pengaplikasian SIPD ini. Maka, tujuan dari penelitian ini yakni untuk melakukan kajian tentang upaya yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan implementasi SIPD di Kabupaten Sumbawa. Hal ini dilakukan dengan melakukan pembahasan terkait persiapan sebelum SIPD diimplementasikan dan bagaimana penyesuaian implementasi SIPD di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Kemudian dibahas juga bagaimana implementasi SIPD mempengaruhi perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan undang-undang yang membicarakan tentang pemerintahan daerah, bahwa diamanatkan untuk dilakukan proses sinkronisasi. Selain itu juga diperlukan adanya harmonisasi dari pembangunan pusat dan daerah. Dalam hal ini SIPD dirasa perlu untuk memberikan kontribusi penting terkait dukungan ketersediaan data-data, perkembangannya, dan harus bersifat *accountable*. Tujuan akhir dari sini adalah diharapkan SIPD mampu mendukung tercapainya penyerentakan data pusat dan daerah sehingga dapat tercapai gudang satu data secara nasional. Winarno dkk mengkaji hal ini dan beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan aktor

di dalam penggunaan SIPD ini sematang mungkin yang berada dari kalangan dinas dan kecamatan pada daerah tersebut. Hal ini dimungkinkan berdampak pada dapat diinputkannya data pembangunan di daerah tersebut oleh aktor ini sehingga data yang *up-to-date* dapat tersedia untuk pihak yang memerlukan (Winarno, Kusnadi, and Afriliana 2019). Hal ini dapat terjadi jika ada optimalisasi penggunaan SIPD yang dilakukan di daerah tersebut.

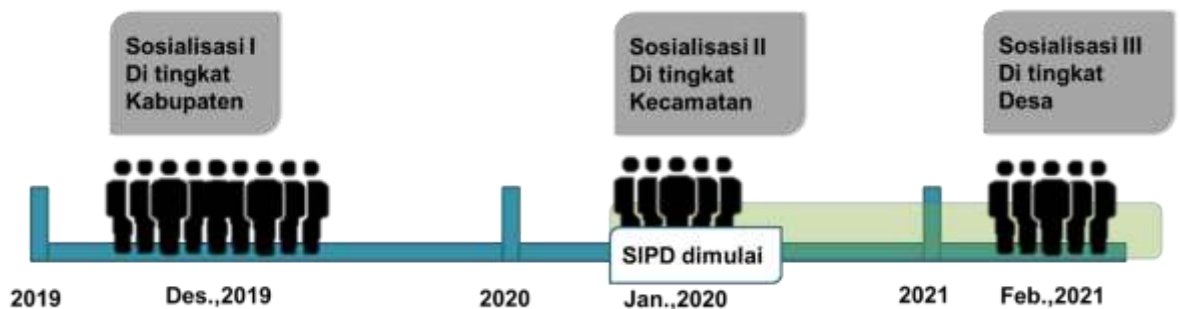
METODE PENELITIAN

Penelitian disini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian yang dimaksud menghasilkan sejumlah data yang bersifat deskriptif berupa beberapa kata yang tertuang di kertas atau dalam bentuk ucapan atau lisan dari informan atau segala perilaku yang dapat diobservasi. Penelitian ini dilaksanakan Di tiga tempat berbeda dengan objek penelitian yang sama. Untuk tingkat Desa di Desa Plampang Kecamatan Plampang, untuk tingkat Kecamatan di Kantor Camat Kecamatan Plampang, dan tingkat Kabupaten di kantor BAPPEDA Sumbawa Besar. Adapun sejumlah langkah yang dilaksanakan dalam penelitian saat ini, yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber terkait utama SIPD, mulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Peneliti melaksanakan observasi yang sifatnya langsung terhadap objek yang diteliti yaitu aplikasi SIPD, melakukan dokumentasi termasuk memperoleh dokumen-dokumen pendukung lainnya. Aktor yang dijadikan informan dalam wawancara ini adalah operator SIPD dan pemangku kepentingan yang melakukan monitoring terhadap SIPD ini. Salah satu aktor yang berperan besar terhadap proses penginputan data secara menyeluruh adalah operator yang sebelumnya sudah diberikan tugas atau yang telah ditunjuk langsung oleh atasan langsung masing-masing. Tugas pokoknya adalah menginput dan mengirim data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan atau disebut dengan Musrenbang ke tingkat di atasnya. Kemudian kepala desa dan camat juga melakukan kegiatan monitoring yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab pemangku kepentingan dalam menjaga agar proses penginputan data perencanaan dapat berjalan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu organisasi yang bersifat publik bekerja dalam lingkungan yang berbeda dibandingkan dengan lingkungan organisasi yang bersifat privat. Perbedaan tersebut berada pada hal keperluan, praktisnya, dan aplikasi pada sektor yang bersesuaian. Perbedaan ini terlihat sangat jelas untuk kasus penggunaan sistem informasi yaitu pada keperluannya, praktis, dan aplikasi pada sektor-sektor tertentu misalnya SIPD. Pada awalnya kemungkinan penggunaan manajemen sistem informasi tidak berbeda untuk organisasi yang bersifat publik dengan organisasi yang bersifat privat. Namun seiring berjalannya waktu dimana komputerisasi dan manajemen sistem informasi dipengaruhi oleh lingkungan manajemen publik, maka perbedaan antara organisasi yang bersifat publik dan organisasi yang bersifat privat menjadi semakin berbeda

(Bovaird and Loeffler 2016). Secara umum, manajemen informasi untuk organisasi privat mungkin masih bisa diimplementasikan kepada organisasi yang bersifat publik. Namun ketika lingkungan organisasinya menjadi salah satu faktor yang krusial, maka manajemen informasi antara organisasi publik dan organisasi privat harus berbeda. Dalam kasus ini SIPD yang dipergunakan adalah untuk membantu perencanaan daerah yang termasuk dalam organisasi publik yang mana lingkungan organisasinya menjadi faktor krusial dalam menentukan berjalannya organisasi tersebut sehingga diperlukan adanya penyesuaian yang nantinya akan membedakan dengan sistem informasi pada organisasi privat. Sebagai langkah awal untuk mengakomodir pernyataan sebelumnya, adalah penting untuk melakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan implementasi SIPD dilakukan dengan menghadirkan tim SIPD Kabupaten Sumbawa. Di dalam pertemuan ini, hasil evaluasi dan laporan yang merujuk kepada sistem informasi lama (dalam hal ini SIMRENDAs) dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan untuk sosialisasi SIPD agar nantinya segala kendala yang dihadapi ketika mengimplementasikan sistem informasi tidak terulang lagi dan dapat dicarikan solusinya ketika mengimplementasikan SIPD. Sosialisasi dilakukan oleh BAPPEDA beserta tim SIPD Kabupaten sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 pada semua tingkatan yang mana timelinenya dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Timeline pelaksanaan sosialisasi

Sosialisasi ini ditetapkan setelah melalui beberapa pertemuan yang dihadiri oleh tim SIPD Kabupaten Sumbawa. Desember 2019, sosialisasi I diadakan pada tingkat kabupaten dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk semua kepala satuan kerja perangkat daerah yang mana dijelaskan gambaran secara umum dan alasan tentang penggunaan SIPD. Setelah itu dilakukan penyeragaman pemahaman SIPD untuk memastikan bahwa setiap aktor di dalamnya tidak akan mengalami miskomunikasi perihal sistem informasi baru yang diperkenalkan. Januari 2020, diadakan sosialisasi II pada tingkat kecamatan yang melibatkan seluruh camat dan operator kecamatan. Disini dijelaskan tentang pengaplikasian SIPD secara teknis dan disini juga dilakukan penjelasan ulang tentang SIPD untuk memastikan masyarakat mengingat kembali penjelasan di sosialisasi sebelumnya serta meningkatkan kualitas sumberdaya (Juaini and Rapii 2017). Februari 2021, sosialisasi III kembali diadakan pada tingkat desa dimana sasarannya adalah seluruh kepala desa di Kabupaten Sumbawa. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan implementasi SIPD. Jadi tiga

sosialisasi ini dilakukan sebelum SIPD, ketika SIPD diimplementasi, dan ketika SIPD sudah dijalankan. Sangat penting untuk mengaitkan dengan teori-teori yang ada tentang sistem informasi (Lim et al. 2013). Untuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan lebih dari satu kali dan dijadwalkan sebelum, saat implementasi, dan setelah implementasi SIPD bertujuan untuk memastikan terjadinya hal di bawah ini untuk SIPD

1. Perencanaan yang matang dapat mengarahkan perilaku aktor-aktor di dalamnya untuk bekerja sama untuk keberlanjutan dari kegiatan tersebut (Ajzen 2020; Gross 2017).
2. Prosesnya dapat termonitor dengan baik dan pada implementasinya dapat segera menemukan kendala sehingga dapat dibuatkan penyesuaian
3. Pada implementasinya dapat memperkuat pengetahuan operator dan pihak pemonitor karena dilakukan dalam jangka waktu yang cukup berdekatan. Hal seperti ini juga mampu membuat operator dan pihak pemonitor merasa nyaman dalam penggunaan sistem ini sesuai dengan teori *acceptance model* (Marangunić and Granić 2015).

SIPD sebagai sistem baru memiliki fitur yang lebih lengkap sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk sosialisasi untuk dapat dimengertinya tambahan-tambahan tersebut (Fatmawati, Cahyono, and Maharani 2019). Fitur yang lebih lengkap ini erat kaitannya dengan teori yang menghubungkan antara ukuran organisasi dan kinerja sistem informasi (Fatmawati, Cahyono, and Maharani 2019). Besarnya suatu organisasi memiliki keterkaitan dengan sistem informasi karena besarnya sumber daya atau ongkos harus menyesuaikan dengan semakin besarnya organisasi. Sumber daya disini bisa dikaitkan dengan fasilitas atau *support* dalam penggunaan SIPD ini yang bertujuan untuk membuat aktor penggunaanya merasa nyaman dalam menggunakan sistem informasi yang diterapkan di daerah tersebut.

Dalam upaya mengoptimalkan implementasi SIPD, dilakukan penyesuaian perlakuan aktor-aktor yang menjalankan SIPD ini. Penyesuaian ini dapat terlaksana oleh karena adanya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan sebelumnya. Terdapat penyesuaian dalam hal pengoperasian SIPD dan penyesuaian dalam hal monitoring SIPD. Berikut adalah tabel-tabel yang menjelaskan perbedaan penyesuaian SIPD berdasarkan situasi tertentu yang dilakukan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Tabel 2. Bentuk penyesuaian SIPD berdasarkan situasi tertentu dalam hal honorarium

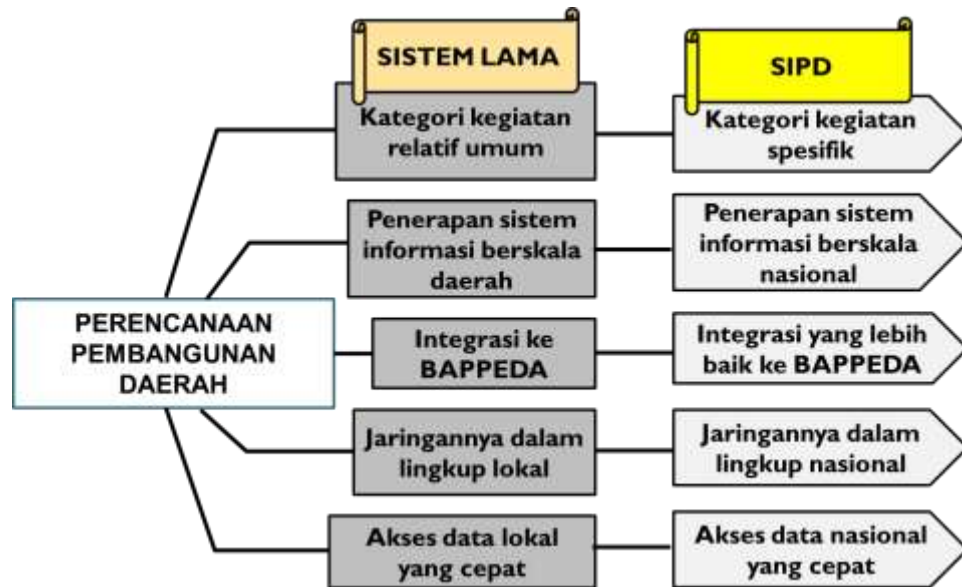
Tingkat desa	Tingkat kecamatan	Tingkat kabupaten
Sebab: Keterbatasan dalam infrastruktur penyedia layanan internet terutama di desa pelosok.	Tidak ada honor khusus pengoperasian SIPD karena tugas ini merupakan bagian dari TUPOKSI sebagai aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan.	Sebab: Tim khusus untuk penanggung jawab SIPD sesuai SK Bupati nomor 529 Tahun 2021.
Akibat: Dibuatnya kebijakan untuk memberikan honor kepada		Akibat : Ada honorarium khusus untuk operator SIPD di

operator yang mana dananya diambil dari dana desa.		tingkat kabupaten.
--	--	--------------------

Tabel 3. Bentuk penyesuaian SIPD berdasarkan situasi tertentu dalam hal operasional dan monitoring

Tingkat desa	Tingkat kecamatan	Tingkat kabupaten
<p>Sebab: Pada umumnya, kepala desa tidak memiliki kemampuan untuk penginputan data SIPD</p> <p>Akibat 1: Pengoperasian dalam hal penginputan diserahkan kepada operator khusus.</p> <p>Akibat 2: Disediakan aplikasi <i>smartphone</i> yang dapat membantu memudahkan kepala desa untuk melakukan monitoring.</p>	<p>Pak Camat melakukan penginputan data dan monitoring. Penginputan data tetap dibantu oleh operator. Ada aplikasi <i>smartphone</i> untuk membantu monitoring.</p>	<p>Pengoperasian dalam hal penginputan data dan monitoring selain mengurus tingkat kabupaten juga harus melakukan pengawasan terhadap penginputan data di tingkat desa dan kecamatan.</p>

Untuk penyesuaian implementasi SIPD, penerapan honor merupakan salah satu strategi untuk mengarahkan perhatian dari aktor di dalamnya untuk memfokuskan pada implementasi SIPD ini. Suatu individu cenderung sensitif terhadap sinyal yang berhubungan dengan *reward* sesuai dengan *reinforcement sensitivity theory* (Pickering and Corr 2008). Selain itu juga, untuk implementasi sistem informasi pada perangkat negara adalah sangat penting untuk mempertimbangkan aktor yang menjalankan dan yang memonitor dibandingkan dengan implementasi sistem informasi pada perusahaan swasta. Bentuk penyesuaian ini pasti akan selalu berlanjut seiring makin bertambahnya waktu mengingat salah satu alasan dari penyesuaian adalah infrastruktur penyedia internet. Ketika pada akhirnya infrastruktur yang lebih baik akan direalisasikan, maka penyesuaian yang baru akan diimplementasikan.



Gambar 3. Peran SIPD terhadap perencanaan pembangunan

Perencanaan Pembangunan daerah mutlak dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Sejak diterbitkan Permendagri Nomor 70 dan 90 tahun 2019 tentang SIPD, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa telah beralih kepada SIPD. Pada bagian pembahasan ini juga dibahas bagaimana implementasi SIPD dapat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa. Untuk ilustrasi pengaruhnya dapat dilihat pada gambar 3. Ilustrasi tersebut dibuat berdasarkan wawancara dengan para informan yang terlibat dalam penggunaan SIPD sebagai sistem informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Gharaibeh dkk. menemukan bahwa performa dari suatu organisasi tidak terpengaruh oleh hardware dan software dari sistem informasi tersebut tapi performa suatu organisasi dapat terpengaruh dengan sangat kuat oleh faktor-faktor tertentu seperti jaringan, integrasi, dan sistem informasi secara keseluruhan dari tingkat terbawah hingga teratas (Gharaibeh and Malkawi 2013). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SIPD mendukung perencanaan pembangunan daerah secara tidak langsung melalui faktor-faktor tertentu pendukung perencanaan pembangunan daerah.

Membuktikan bahwa akses data yang cepat mampu membantu percepatan dalam penentuan kebijakan terutama dalam hal waktu (Brown et al. 2017). Implementasi SIPD dirasa telah mampu melakukan integrasi yang lebih baik ke BAPPEDA yang mana membentuk tim untuk memonitor sekaligus memberikan koordinasi yang mana nantinya dapat secara tidak langsung mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Ini menyambung kepada faktor penting lainnya yaitu jaringan SIPD dalam lingkup nasional yang mana terdapat akses untuk perangkat negara untuk juga ikut memonitor perkembangan perencanaan di seluruh daerah di Indonesia. Ini merupakan salah satu karakteristik implementasi sistem informasi pada perangkat negara yang tidak dapat ditemukan ketika menggunakan sistem informasi lama yang berkala daerah (Vasu, Stewart, and Garson 2017). Kemudian, karena SIPD ini merupakan sistem informasi berskala nasional, maka akan diterapkan di seluruh daerah di Indonesia sehingga ketika dilakukan

pengembangan dapat dilakukan secara serentak untuk menghindari adanya keteringgalan pengembangan sistem informasi di tingkat daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan di tingkat pusat (Vasu, Stewart, and Garson 2017). Poin terakhir adalah perihal kategori kegiatan dalam SIPD yang lebih spesifik. Ketika suatu sistem informasi kini menjadi lebih luas cakupannya (dari daerah menjadi nasional) maka adalah hal yang lumrah untuk dibarengi oleh semakin rumitnya suatu sistem informasi tersebut (Mansor et al. 2016). Oleh karena selalu berkembangnya suatu daerah, maka bentuk penyesuaian SIPD di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten pasti akan mengalami perubahan. Sehingga penelitian selanjutnya tentang SIPD ini menjadi penting untuk dilakukan.

KESIMPULAN

Upaya untuk mengoptimalkan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sumbawa telah dikaji pada penelitian yang bersifat kualitatif ini. Dalam upaya untuk mengoptimalkan implementasi SIPD, sosialisasi yang disusun berdasarkan pertemuan yang dihadiri tim SIPD ini dilaksanakan sebanyak tiga kali sebelum dan sesudah diimplementasikannya SIPD yang mana dilakukan pada level desa, level kecamatan, dan level kabupaten. Berdasarkan hasil sosialisasi ini, dilakukan penyesuaian implementasi SIPD di tingkatan desa sampai ke tingkatan kabupaten. Pada penelitian ini, fokus kajian adalah pada kebijakan honor operator sistem informasi dimana terdapat penyesuaian dimana honor diberikan di tingkat desa dan kabupaten oleh karena menyesuaikan dengan kondisi di desa yang minim infrastruktur jaringan dan karena adanya kewajiban tambahan, secara berturut-turut. Selain itu terdapat penyesuaian dalam bentuk aplikasi *smartphone* yang disediakan untuk monitoring. Implementasi SIPD ini memiliki pengaruh positif terhadap perencanaan pembangunan daerah yang mana ditunjukkan dari adanya peningkatan faktor-faktor pendukung pembangunan daerah. Maka, telah dilakukan upaya untuk mengoptimalkan SIPD di Kabupaten Sumbawa yang mana terlihat dari adanya perencanaan sosialisasi dan penyesuaian SIPD yang bersesuaian dengan keadaan Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan penelitian ini, untuk mengoptimalkan implementasi SIPD perlu dilakukan sosialisasi atau monitoring yang berkelanjutan untuk memastikan penyesuaian yang dilakukan dapat sesuai dengan keadaan saat itu. Hal ini penting mengingat keadaan dari suatu daerah selalu berubah seiring berjalannya waktu.

DAFTAR PUSTAKA:

- Agranoff, Robert, and Michael Mc Guire. 2006. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Government*.
- Ajzen, Icek. 2020. "The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions." *Human Behavior and Emerging Technologies* 2(4): 314–24.
- Anggoro, Dani, and Ahmad Hidayat. 2020. "Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Web Guna Meningkatkan Efektivitas Layanan Pustakawan." *Edumatic : Jurnal Pendidikan Informatika* 4(1): 151–60.
- Bappeda Kab. Sumbawa. 2021. *Ranwal RPJMD Pemerintah Kabupaten Sumbawa*.
- Bovaird, Tony, and Elke Loeffler. 2016. *Public Management and Governance, 3rd Ed.* Routledge.
- Brown, Jeremy B., Amir Salehi, Wassim Benhallam, and Sebastien F. Matringe. 2017. "Using Data-Driven Technologies to Accelerate the Field Development Planning Process for Mature Field Rejuvenation." *SPE Western Regional Meeting Proceedings* 2017-April: 1610–29.
- Checkland, P, and S Holwell. 1998. *Information, Systems, and Information Systems*.
- Fatmawati, Indra, Dwi Cahyono, and Astrid Maharani. 2019. "Pengaruh Partisipasi Pemakai Sistem Informasi, Kemampuan Pemakai Sistem Informasi, Ukuran Organisasi Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi." *International Journal of Social Science and Business* 3(1): 11.
- Frans Dione, Utami Faradina. 2020. "Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Koordinasi Pembangunan Di Daerah (Studi Tentang Penerapan SIPD Pada BAPPEDA Kota Bengkulu)." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan* 1(January): 21–28.
- Gharaibeh, Shehadeh, and Nazem Malkawi. 2013. "The Impact of Management Information Systems on the Performance of Governmental Organizations-Study at Jordanian Ministry of Planning." *International Journal of Business and Social Science* 4(17): 101–9.
- Gross, Mason. 2017. *Planned Behavior: The Relationship between Human Thought and Action*.
- Juaini, Muhamad, and Muhammad Rapii. 2017. "Strategi Manajemen Sumberdaya Manusia." *Educatio* 12(1): 30–39.
- Lim, Sanghee, Terence J V Saldanha, Suresh Malladi, and Nigel P. Melville. 2013. "Theories Used in Information System Research: Insights from Complex Network Analysis." *Journal of Information Technology Theory and Application* 14(2): 5–46.
- Mansor, Nor Hafizah Abd, Intan Salwani Mohamed, Lai Ming Ling, and Nawal

- Kasim. 2016. "Information Technology Sophistication and Goods and Services Tax in Malaysia." *Procedia Economics and Finance* 35(October 2015): 2–9. [http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)00003-4](http://dx.doi.org/10.1016/S2212-5671(16)00003-4).
- Marangunić, Nikola, and Andrina Granić. 2015. "Technology Acceptance Model: A Literature Review from 1986 to 2013." *Universal Access in the Information Society* 14(1): 81–95.
- Muntohar, Arif. 2020. "Sistem Informasi Data Klien Berbasis Java Pada Kantor Notaris Dan PPAT." *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika* 4(2): 58–67.
- Nasution, Muhammad Irfan, and Nurwani. 2021. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKD) Kota Medan." *Jurnal Akutansi dan Keuangan* 9(2): 109–16.
- O'Brien, James A, and George M Marakas. 2008. *Management Information Systems 7th Ed.*
- Perencanaan, Badan et al. 2020. "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado)." *Jurnal Eksekutif* 2(5): 1–13.
- Pickering, Alan D., and Philip J. Corr. 2008. "J.A. Gray's Reinforcement Sensitivity Theory (RST) of Personality." *The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment: Volume 1 - Personality Theories and Models* (August): 239–56.
- Rondinelli, Dennis A. 2019. *Urban and Regional Development Planning.*
- Ruhana, Faria. 2017. "Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pembangunan* 4: 2–25.
- Setianingsih, Budhi, Setyowaty, and Siswidiyanyo. 2019. "Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan)." *Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang* 1(5): 87–101.
- Sudianing, Ni Ketut; Seputra, Ketut Agus. 2019. "Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah." *Locus Majalah Ilmiah FISIP* 11(2): 1–22.
- Vasu, Michael L, Debra W Stewart, and G David Garson. 2017. *Organizational Behavior and Public Management, Revised, and Expanded.*
- Winarno, PM, Adhi Kusnadi, and Nunik Afriliana. 2019. "Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tangerang." *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* 2: 117–23.

